

Peran Intelijen dan Model Counterinsurgency Dalam Menghadapi Ancaman Insurgensi di Papua Melalui Mystic Diamond

Lettu Arh Nur Afiad Syamiajaya, S.Tr (Han)¹ Kolonel Sus Dr. Drs. Mhd. Halkis, M.H.²
Kolonel Arm Dr. Ahmad G. Dohamid, S.Sos., M.A.P³ Muhamad Noor Gibran⁴
Program Studi Strategi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3,4}
Email: arhanud2018@gmail.com¹

Abstrak

Sejarah politik bangsa menghadapi konflik internal dengan keragaman etnis, agama, ras, dan SARA yang dapat mengarah pada disintegrasi. Indonesia berhasil mengatasi pemberontakan GAM, tetapi konflik terus berlanjut di Papua. Strategi kontrainsurgensi yang melibatkan masyarakat secara lebih aktif diperlukan untuk melindungi dari pemberontakan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa peran intelijen dan model counterinsurgency dalam menghadapi ancaman insurgensi di Papua melalui mystic diamond. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konflik Papua, dimensi internasional menjadi penting karena dukungan dari komunitas internasional terhadap gerakan separatisme Papua. ULMWP menjadi fokus utama dalam mendukung pemberontakan, dengan dukungan dari negara-negara Melanesia seperti Vanuatu. Konflik ini juga memicu perhatian internasional terutama dalam forum seperti Majelis Umum PBB, di mana isu-isu seperti pelanggaran HAM di Papua dibahas. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan diplomasi dan tindakan keamanan terhadap gerakan separatisme. Peran intelijen menjadi krusial dalam mendeteksi dan menganalisis ancaman, sementara model Mystic Diamond digunakan untuk menghadapi konflik ini dengan pendekatan multi-dimensional, termasuk dialog, kontrol keamanan, dan upaya internasionalisasi Papua. Upaya memperbaiki akar permasalahan sosial, ekonomi, dan politik di Papua juga penting dalam menyelesaikan konflik ini secara komprehensif.

Kata Kunci: Intelijen, Counterinsurgency, Insurgensi, Mystic Diamond



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejarah politik bangsa menunjukkan fenomena konflik internal dengan keragaman etnis, agama, ras, dan antar kelompok (SARA) yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Salah satu dimensi konflik perang tak beraturan adalah pemberontakan. Pada tahun 2005, Indonesia berhasil mengakhiri pemberontakan gerakan GAM. Saat ini, konflik yang masih terjadi adalah jaringan Islam radikal dan separatis di Papua yang menunjukkan eskalasi yang cenderung memanas (Karnavian, 2017). Seperti bola salju yang terus bergulir, kelompok pemberontak bermaksud memecah integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Argumen penolakan terhadap pendekatan keamanan yang diambil dalam konflik Papua adalah pendekatan kekuasaan lunak dalam bentuk komunikasi yang konstruktif. Sangat disayangkan, opsi ini belum berhasil menyelesaikan masalah yang ada dan menyebabkan korban sipil dan militer. Insiden lain adalah penolakan otonomi khusus pada September 2020, serangan KKB terhadap pemimpin agama dan petugas kesehatan pada Juli 2022.

Merujuk pada sishankamrata menempatkan TNI dan Polri sebagai komponen utama (Komut) dan rakyat sebagai komponen pendukung (Komduk). Dalam menentukan strategi kontrainsurgensi, beberapa prinsip terpenting adalah mendapatkan dukungan masyarakat yang mempengaruhi rekrutmen, logistik, dan tempat perlindungan bagi kelompok pemberontak (Ashour, 2009). Selain itu, prinsip yang harus dipertahankan adalah melindungi

warga dari kelompok pemberontak sehingga cenderung mempunyai sikap antipati terhadap negara. Prinsip ketiga adalah fokus pada tindakan propaganda yang mempengaruhi opini publik dan dukungan terhadap tindakan pemberontakan (Ramakhrisna dan Tan, 2002). Setelah perang dingin, nasionalisme berkembang pesat di Eropa Tengah, Eropa Timur, Afrika, dan Asia, termasuk Indonesia. Pemberontakan bertransformasi dengan propaganda berbasis teknologi (Meel & Vishwakarma, 2020). Kelompok pemberontak menarik perhatian internasional dengan menyamar di balik isu pelanggaran hak asasi manusia (Nasution & Wiranto, 2020; Ramdhan, 2021). Celah dalam masalah yang telah terjadi sejauh ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu sejarah integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia, isu pelanggaran hak asasi manusia, marginalisasi orang Papua, dan stagnasi pembangunan (Chauvel, 2005). Penyebab konflik ini dapat diklasifikasikan sebagai faktor kebijakan dan tuntutan ekonomi dalam bentuk desentralisasi, faktor identitas etnis, faktor sejarah, faktor kekerasan aparat keamanan, dan faktor kapitalisme internasional (Mambraku, 2015).

Pada dasarnya strategi kontrainsurgensi adalah upaya pemerintah pusat untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan legitimasi politik, pengaruh, dan kegiatan operasional. Bertujuan untuk melindungi rakyat dari kelompok pemberontak. Efek simultan dari tekanan psikologis, ekonomi, sosial, dan politik pada kelompok pemberontak (Joint Chief of Staff of the United States Air Force, 2018). Sikap negara dalam pelaksanaan kontrainsurgensi (COIN) umumnya berupa tindakan langsung terhadap pemimpin kelompok pemberontak, tindakan yang memicu terjadinya pemberontakan, pelaksanaan infiltrasi dalam kelompok pemberontak untuk mengetahui langkah yang akan dilakukan, dan memperkuat politik suatu negara (Galula, 2006). Gerakan pemberontakan terdiri dari komponen minoritas yang bersimpati, mayoritas netral, dan minoritas bermusuhan. Strategi COIN dalam tindakan pencegahan adalah agar kelompok minoritas berada dalam posisi menguntungkan. Sementara itu, mayoritas netral dipengaruhi untuk menetralkan dampak besar ancaman minoritas bermusuhan.

Berbagai pendekatan mulai dari otoriter hingga humanis telah diambil. Masalah multidimensi ekonomi, politik, sosial, budaya, ideologi, pertahanan, dan keamanan. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan adalah holistik, komprehensif, dan integral. Dua tujuan yang ingin dicapai dalam gerakan pemberontakan adalah penanaman ideologi yang dilakukan oleh radikalisme dan kemerdekaan seperti gerakan pemberontakan Papua. Formulasi untuk meningkatkan birokrasi pemerintah, ekonomi, dan stabilitas keamanan sangat penting. Dengan demikian, Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat untuk memenangkan hati rakyat Papua dan dukungan massal. Kepercayaan simultan terbangun di dalam hati rakyat Papua dan merasa bebas dalam Republik Indonesia (Wanggai, 2017). Dengan menganalisis model strategi kontrainsurgensi "The Mystic Diamond" yang dikembangkan oleh Gordon McCormick, penulis menganalisis kesenjangan masalah dan merekomendasikan solusi yang konstruktif.

Intelijen memiliki peran yang strategis dalam mendeteksi potensi konflik di Papua. Mereka memiliki keterampilan dan sumber daya untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan tentang perkembangan situasi di daerah konflik. Dengan memiliki jaringan luas dan akses ke berbagai informasi, intelijen bisa memberikan informasi yang akurat dan berkualitas kepada pemerintah untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengatasi konflik. Peran intelijen dalam melakukan deteksi dini konflik Papua dapat dijelaskan (Wale, 2019). Pertama, analisis situasi konflik. Intelijen melakukan analisis mendalam tentang akar penyebab konflik, pihak-pihak yang terlibat, dan potensi eskalasi konflik. Mereka juga memantau perkembangan situasi konflik secara terus-menerus. Kedua, Pengumpulan informasi. Intelijen mengumpulkan berbagai informasi terkait konflik, baik dari sumber terbuka maupun sumber

tertutup. Mereka juga memantau media sosial dan aktivitas online untuk mendeteksi potensi konflik. Ketiga, menganalisis ancaman keamanan. Intelijen mengevaluasi potensi ancaman keamanan yang dapat muncul akibat konflik di Papua. Mereka juga mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tersebut. Keempat, memberikan rekomendasi: Berdasarkan hasil analisis dan pengumpulan informasi, intelijen memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah preventif atau responsif dalam mengatasi konflik. Dalam melaksanakan perannya, intelijen perlu bekerja secara koordinatif dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, serta lembaga non-pemerintah. Kerjasama antarlembaga ini penting untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan akurat tentang kondisi konflik di Papua. Sehingga pendekatan model mystic diamond ini merupakan strategi untuk mempermudah peran intelijen dalam konflik Papua.

Landasan Teori Intelijen

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, intelijen merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertugas mencari informasi atau mengamati individu atau kelompok. Intelijen memerlukan tingkat kecerdasan tinggi, kemampuan analisis yang tajam, dan berpikir yang tepat (Naim, 2007). Komite Haufer, dipimpin oleh Herbert Haufer, memberikan definisi tentang intelijen sebagai proses untuk memperoleh informasi sebelum melakukan suatu tindakan dengan cara yang terorganisir (Karwita, 2008). IDSPS menyatakan intelijen berasal dari kata "*intelligence*" yang berarti kecerdasan, kemampuan analisis, dan pemahaman situasi atau informasi dengan rasional. Sebagai aktivitas profesional, intelijen dianggap sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh ahli pemerintah untuk menyediakan informasi dan kontra-intelijen untuk keamanan nasional (Karwita, 2008).

Intelijen terdiri dari tiga pilar utama yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan informasi. Penyelidikan merupakan inti dari aktivitas intelijen karena informasi yang dikumpulkan akan menjadi pengetahuan intelijen (laporan intelijen). Informasi dari intelijen digunakan sebagai dasar untuk melakukan upaya pengamanan dan penggalangan untuk mencegah ancaman. Akumulasi pengetahuan intelijen juga menjadi pedoman bagi instansi dan pihak terkait untuk menanggulangi ancaman intelijen (Karwita, 2008). Intelijen dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu kegiatan intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan informasi secara rutin untuk memantau situasi, serta operasi intelijen yang dilakukan berdasarkan rencana dengan membentuk unit kecil yang disebut *small group of intelligence*. Operasi intelijen ini memiliki sifat militer dengan sasaran yang jelas dan terukur dari awal hingga akhir operasi, termasuk dalam kegiatan-operasi tertutup clandestine yang dilakukan oleh negara-negara lain (Manullang, 2001).

Definisi intelijen menurut kamus *Webster's New Collegiate Dictionary (2004)* adalah, "*The ability to learn or understand or deal with new or trying situation; The ability to apply knowledge to manipulate one's environment or to think abstractly Information or news..*" (Staff, 2004). Salah satu cara berpikir yang lebih ringkas tentang intelijen adalah memandang bisnisnya yang berkaitan dengan informasi, baik itu pencurian informasi, mengeksploitasi suatu informasi sesuai kepentingan atau mengamankan informasi tersebut dari pencurian. Sedangkan Sherman Kent yang dikenal sebagai bapak dari intelijen analisis berargumen bahwa intelijen mencakup tiga hal yang terpisah dan berbeda, yaitu: pengetahuan, jenis organisasi yang menghasilkan pengetahuan tersebut dan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi tersebut (Irving & Kent, 1951). Hal ini juga menjadi pedoman yang sama di komunitas intelijen Indonesia, dimana berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen negara dalam pasal satu disebutkan bahwa "Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan

kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional” (DPR RI 2011).

Selain memiliki peran yang menyangkut bagaimana pengetahuan diperoleh, dihasilkan, dan digunakan, intelijen juga melaksanakan kegiatan *covert action*. Kerangka yang lebih luas ini mengacu pada aktivitas dinas intelijen selama masa pra-modern (Clive, 1985). Ini selaras dengan perspektif Richard Aldrich bahwa aktivitas dinas intelijen mencakup operasi rahasia (*covert action*) untuk mempengaruhi dunia dengan cara yang tak terlihat atau tangan yang tersembunyi (Garthoff, 2002). Kongres AS mendefinisikan *covert action* sebagai kegiatan Pemerintah AS untuk mempengaruhi kondisi politik, ekonomi, atau militer di luar negeri, yang dimaksudkan agar peran dari AS tidak terlihat atau diakui secara publik (Devine, 2020). Selain itu, kegiatan ini tidak termasuk ke dalam:

1. Kegiatan dengan tujuan utama untuk memperoleh data intelijen dan kegiatan kontra intelijen untuk meningkatkan atau memelihara keamanan nasional.
2. Kegiatan diplomatik atau militer.
3. Kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum atau dukungan rutin untuk kegiatan semacam itu.
4. Kegiatan untuk memberikan dukungan rutin dari kegiatan terbuka lainnya dari lembaga pemerintah lainnya di luar negeri.

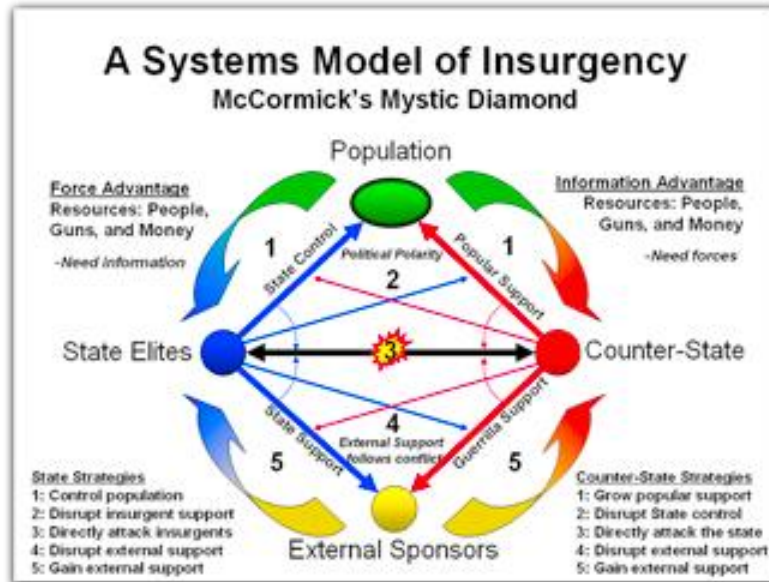
Covert action umumnya dimaksudkan untuk mempengaruhi kondisi suatu negara sebagai alternatif dari eskalasi yang mungkin mengarah pada aksi militer lanjutan atau diperpanjang (McCarthy, 2014). Tidak seperti aktivitas intelijen pada umumnya, *covert action* bukan aktivitas intelijen pasif. Aktivitas ini memiliki dampak publik yang terlihat yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perubahan dalam lingkungan militer, ekonomi, atau politik di luar negeri yang mungkin terbukti kontraproduktif untuk negara yang melaksanakan *covert action* (Lowenthal, 2000). Contoh sejarah pelaksanaan *covert action* oleh komunitas intelijen AS adalah intervensi CIA dalam kudeta 1953 di Iran (Gasiorowski & Byrne, 2015), invasi Teluk Babi Kuba pada tahun 1961 (G. Chaliand dan A. Blind, 2007), perang rahasia era Vietnam di Laos (Leary, 2007) dan dukungan kepada serikat buruh Solidaritas Polandia pada tahun 1970-an dan 1980-an (Church, 1976) serta kepada kelompok Mujahidin di Afghanistan selama tahun 1980-an (Crile, 2015).

Diamond Model Counter Insurgency

Konflik Papua dalam model McCormick merupakan konflik antara pemerintah Indonesia dan kelompok pemberontak/separatis di Papua. Pemberontakan didefinisikan sebagai gerakan untuk menggulingkan otoritas pemerintah melalui perang terbatas dengan konfrontasi bersenjata. Taktik umum kelompok pemberontak termasuk menyerang titik-titik lemah negara dengan bersembunyi di tengah populasi. Pemberontak menghindari konfrontasi langsung seperti perang besar-besaran karena keterbatasan kekuatan militer. Strategi ini membuat pendekatan tradisional menjadi tidak efisien karena memadamkan kelompok pemberontak seringkali mengakibatkan korban di kalangan warga sipil. Tidak jarang warga negara menjadi korban dari operasi kontra-pemberontakan (Ramadhan, 2021).

Dari situ, konsep kontra-pemberontakan (COIN) muncul, yang merupakan strategi khusus untuk menyelesaikan pemberontakan dengan menggunakan kombinasi tindakan militer, paramiliter, politik, ekonomi, psikologis, dan sipil. Definisi lain dari kontra-pemberontakan adalah upaya pemerintah untuk mengalahkan gerakan pemberontak melalui kombinasi faktor militer, politik, ekonomi, dan psikologis. Strategi inti COIN adalah

memenangkan ‘hati dan pikiran rakyat’. Asumsi utamanya adalah bahwa gerakan pemberontak akan padam jika dipisahkan dari dukungan komunitas lokal. David Galula menyarankan bahwa formula COIN yang ideal terdiri dari 80 persen politik dan 20 persen militer (Ramdhan, 2021). Hal tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Mystic Diamond Model Insurgency
Sumber : Ramdhan, 2021

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis masalah, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan pada observasi fenomena dan substansi makna fenomena. Fokus model penelitian kualitatif mengacu pada aspek-aspek fenomena, cara pemahaman peristiwa, perilaku manusia, elemen manusia, hubungan, organisasi, dan objek (Sugiyono, 2018). Penelitian kualitatif memiliki model induktif dalam proses translasi masalah kompleks (Creswell, 2010:5). Kontrol variabel memiliki relevansi dengan strategi, struktur, dan rencana penelitian (Herlinger dalam Sutopo, 2006:156). Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengarahkan paradigma pada masalah yang sedang diteliti. Refleksi terhadap paradigma penelitian kualitatif adalah konsepsi metodologis, konsepsi teoritis, dan asumsi (Aminuddin dalam Basrowi & Suwandi, 2008:45). Dimana konsepsi metodologis terdiri dari orientasi postpositivis, orientasi konstruktivis, dan orientasi postmodernis. Dengan demikian, penelitian kualitatif bersifat dinamis, multi-metode, dan multi-perspektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Eskalasi Insurgensi di Papua

Dimensi internasional dalam konflik Papua muncul karena beberapa faktor, yaitu ketidakselesaian masalah domestik di Papua seperti perasaan ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, dan impunitas. Selain itu, terdapat hubungan antara kelompok pemberontak Papua dengan komunitas internasional, serta narasi diplomatik yang mendukung gerakan pemberontak Papua dan meragukan legitimasi operasi pemerintah Indonesia di Papua (Afriandi, 2015). *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) merupakan organisasi utama yang mendukung gerakan pemberontak Papua. Konflik yang terus berlanjut juga memberikan kesempatan bagi kelompok pemberontak ini untuk berkembang. Pada tanggal 7

Desember 2014, pertemuan antara berbagai organisasi Papua menyatakan kesatuan di bawah naungan ULMWP di Vanuatu. ULMWP bertujuan untuk menjadi wadah utama dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua di tingkat internasional (Febriana, 2019). Keputusan *Melanesian Spearhead Group* (MSG) untuk mengakui ULMWP sebagai observer juga menjadi ancaman diplomasi bagi Indonesia, memaksa Indonesia untuk memperkuat dukungan diplomatiknya di kawasan Oceania. Faksi dalam MSG pun terbagi terkait isu Papua, dengan beberapa negara mengakui kedaulatan Indonesia di Papua sementara yang lain tetap memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Solusi militer, terutama strategi kontra-insurjensi berbasis model *mystic diamond* McCormick, telah menjadi titik rujukan untuk menyelesaikan masalah keamanan dalam konflik internal antara pemerintah Indonesia dan kelompok pro-kemerdekaan di Papua. Operasi militer masih bisa menahan konflik di Papua pada tingkat lokal dan mencegah eskalasi konflik menjadi konflik berintensitas tinggi. Namun, ada beberapa perkembangan yang mengkhawatirkan dalam konflik Papua selama empat tahun terakhir yang memerlukan perhatian khusus. Perkembangan yang mengkhawatirkan dapat dilihat dalam beberapa kasus kekerasan yang terjadi. Pada tanggal 1 Desember 2018, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Gerakan Papua Merdeka (OPM) menembak dan membunuh 19 karyawan Istaka Karya di kabupaten Nduga, menandai tindakan kekerasan paling mematikan di Papua pada tahun 2018 (Sitepu, 2017).

Kejadian lain dengan magnitudo yang sama dengan penembakan di Nduga terjadi di Biak pada tanggal 6 Juli 1998, Wamena pada tanggal 4 April 2003, dan Paniai pada tahun 2014. Kejadian di Biak terjadi ketika sekelompok pendukung Gerakan Papua Merdeka secara damai mengibarkan bendera Bintang Kejora. Pasukan keamanan menanggapi dengan operasi militer. Akibatnya, 8 orang meninggal dunia, 3 dinyatakan hilang, 37 terluka, 150 ditahan, dan 32 mayat tidak teridentifikasi. Di sisi lain, dalam insiden 'Wamena Berdarah', serangan di markas Kodim 1702/Wamena memicu operasi penyisiran di 25 desa. Serangan tersebut menyebabkan kematian dua anggota Kodim, yakni Lettu TNI AD Napitupulu dan Pratu Ruben Kana, dengan satu orang mengalami luka parah. Menurut data Komnas HAM, kasus ini mengakibatkan sembilan kematian dan 38 luka parah. Pemindahan paksa dari 25 desa menyebabkan 42 kematian akibat kelaparan dan 15 kasus kekerasan sewenang-wenang terhadap korban. Komnas HAM juga menemukan kasus pemaksaan penandatanganan pernyataan dan penghancuran fasilitas umum. Contoh ketiga adalah penembakan di Enarotali, kabupaten Paniai, yang menewaskan 4 remaja dan melukai 17 orang lainnya. Komnas HAM menemukan pelanggaran hak asasi manusia serius dalam penembakan di Paniai (Afriandi, 2015). Siklus kekerasan di Papua tidak terbatas pada konflik bersenjata. Kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019, misalnya, memicu kerusuhan massal di Paniai, Fak-Fak, Sorong, dan baru-baru ini di Wamena. Dalam kerusuhan tersebut, 6 warga sipil dan 1 prajurit dilaporkan sebagai korban. Namun, Kepolisian Negara membantah laporan tersebut. Konfirmasi jumlah korban terhambat karena Pemerintah Indonesia membatasi akses bagi wartawan dan internet selama kerusuhan di Papua (Febriana, 2019).

Dimensi Internasionalisasi Konflik Papua

Mengapa konflik Papua menjadi perhatian internasional? Selain karena diplomasi Indonesia yang kurang berhasil dalam mengatasi dukungan luar terhadap Papua, ULMWP memiliki kemampuan diplomasi yang kuat untuk mengakses komunitas internasional. Tokoh seperti John Ondawane, Benny Wenda, Rex Rumakiek, dan Octavianus Mote memiliki koneksi yang luas ke negara-negara Melanesia, terutama Vanuatu. Benny Wenda sendiri telah muncul di berbagai media internasional seperti Ted Talks di Australia, televisi nasional Selandia Baru,

Inggris, dan Kanada untuk memberikan informasi terkait situasi di Papua. Kurangnya transparansi Indonesia dalam operasi kontra-insurjensi, terutama mengenai penanganan kekerasan dalam penanganan konflik, juga menarik perhatian dari negara-negara Pasifik seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon dalam debat Majelis Umum PBB tahun 2016. Narasi kekerasan adalah alasan utama mengapa organisasi seperti Gerakan Pembebasan Bersatu Papua Barat (ULMWP), yang mendukung kemerdekaan Papua, menerima dukungan politik dari beberapa organisasi hak asasi manusia internasional dan politisi dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Meskipun pengaruh terbatas negara-negara kepulauan Pasifik seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon di arena internasional, tuduhan diplomatik dalam debat PBB bisa mencemarkan reputasi Indonesia secara internasional (Ramdhan, 2021).

Pembiaran masalah domestik Papua, seperti impunitas dan diskriminasi ekonomi tanpa penyelesaian, menjadi penyebab kegagalan diplomasi Indonesia. Impunitas seringkali menarik perhatian dari pemerhati HAM di dalam dan luar negeri, namun pemerintah Indonesia menolak untuk bersikap transparan atau menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan isu tersebut. Dalam hal ekonomi, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana besar untuk pembangunan Papua, namun hal ini tidak berhasil mengurangi ketimpangan dengan provinsi-provinsi lainnya (Gleditsch et al., 2008). ULMWP mampu memanfaatkan lambannya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah sosial-ekonomi dan budaya di Papua untuk menginternasionalisasi konflik tersebut, dengan menggambarkan situasi sebagai bentuk kolonialisasi. Deklarasi yang diteken beberapa politisi dan perdana menteri dalam parlemen Inggris memperkuat tuntutan untuk hak kemerdekaan Papua melalui referendum yang diawasi PBB (Gleditsch et al., 2008). Laporan NGO dan literatur akademik juga mendukung gambaran kekerasan terhadap rakyat Papua, yang sering digunakan oleh delegasi Vanuatu dan Kepulauan Solomon dalam menyerang Indonesia. Tuduhan pelanggaran HAM, seperti kasus penembakan di Wamena dan Paniai yang tidak pernah diadili, juga menjadi sorotan dalam pertemuan komisioner HAM PBB. Menyinggung tentang diskriminasi dan marginalisasi orang Papua oleh Indonesia juga menjadi perhatian dalam sidang komisioner HAM PBB (Warsal, 2017).

Ketidaktransparanan dan kurangnya keterbukaan dari pihak keamanan di Papua menjadi hambatan utama dalam memverifikasi kebenaran laporan dan tuduhan yang diajukan oleh diplomat dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Meskipun pemerintah Indonesia telah berkali-kali menyangkal adanya pelanggaran HAM dan menyebutnya sebagai propaganda ULMWP, namun masyarakat internasional cenderung merasa simpati terhadap situasi yang dihadapi oleh rakyat Papua. Simpati dari masyarakat internasional juga menjadi dasar bagi kebijakan luar negeri Vanuatu dan Kepulauan Solomon dalam mendukung isu HAM dan perjuangan ULMWP di forum internasional (United Nation, OCHCR, 2016). Ada dua alasan yang menjelaskan mengapa simpati ini mendorong Vanuatu dan Kepulauan Solomon untuk membantu ULMWP. Pertama, pelanggaran HAM menjadi sorotan dunia internasional dan memperhatikan konflik internal suatu negara. Kedua, korban dari pelanggaran HAM di Papua sebagian besar berasal dari etnis Melanesia, yang kemudian dijadikan sebagai alat propaganda ULMWP untuk mendapat dukungan dari negara-negara lain. Negara-negara seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon, yang mayoritas penduduknya adalah etnis Melanesia, merespon propaganda ULMWP dengan positif. Selain karena ikatan kekerabatan etnis Melanesia, bantuan kepada ULMWP juga dipandang sebagai tanggung jawab moral untuk melindungi warga Papua, yang dalam pandangan ULMWP, merupakan korban penindasan oleh pemerintah kolonial Indonesia (United Nation, OCHCR, 2016).

Peran Intelijen Dalam Deteksi Dini Konflik di Papua

Dalam kaitannya dengan peran intelijen dalam menghadapi ancaman insurgensi di Papua, intelijen memiliki peran yang sangat penting dalam mendeteksi, menganalisis, dan memberikan informasi yang relevan untuk mengatasi ancaman tersebut. Insurgensi di Papua telah menjadi isu yang kompleks dan sensitif, yang memerlukan pendekatan yang hati-hati dan bersifat strategis dalam menangani masalah ini. Dalam konteks ini, intelijen memainkan peran utama dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai tentang kelompok-kelompok pemberontak maupun potensi ancaman lain yang berkaitan dengan insurgensi di Papua (Naim, 2007). Konsep intelijen yang mencakup kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan informasi dapat membantu pemerintah untuk memahami secara lebih mendalam dinamika ancaman insurgensi di Papua. Dengan adanya informasi yang tepat dan terkini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi ancaman tersebut. Intelijen juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional yang lebih proaktif dan preventif untuk mengatasi masalah insurgensi di Papua (Karwita, 2008). Dalam konteks ini, teori intelijen yang dikemukakan oleh Sherman Kent, yang mengemukakan bahwa intelijen mencakup pengetahuan, jenis organisasi yang menghasilkan pengetahuan tersebut, dan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi tersebut, sangat relevan dalam mendiskusikan peran intelijen dalam menghadapi ancaman insurgency di Papua. Pengetahuan intelijen tentang kelompok-kelompok pemberontak, jalur penyelundupan senjata, dan kontak-kontak asing yang terlibat dalam gerakan pemberontakan dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi pengamanan yang lebih efektif (Irving & Kent, 1951).

Selain itu, melalui kegiatan *covert action*, intelijen juga dapat melakukan tindakan yang lebih aktif dan berorientasi pada tujuan dalam mengatasi ancaman insurgensi di Papua. Namun, dalam mengimplementasikan *covert action*, perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampak-dampak yang mungkin terjadi. Penggunaan *covert action* yang tidak bijaksana atau tanpa perhitungan yang matang dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, peran intelijen dalam mengelola *covert action* perlu dilakukan dengan cermat dan berdasarkan analisis yang mendalam tentang risiko dan manfaatnya (Devine, 2020). Sistem deteksi dini yang berjalan di tingkat kewilayahan akan menghasilkan informasi intelijen melalui proses pengolahan bahan keterangan yang diperoleh. Bahan keterangan adalah bahan dasar mentah yang harus memenuhi syarat sebelum dijadikan intelijen, yaitu berkaitan dengan masalah keamanan, dipercaya sumbernya, dan relevan dengan masalah yang dicari. Intelijen yang sudah diolah kemudian disampaikan kepada pihak pengguna untuk digunakan dalam penyusunan rencana dan keputusan. Intelijen diperlukan dalam perencanaan, kebijaksanaan, dan tindakan (Devine, 2020).

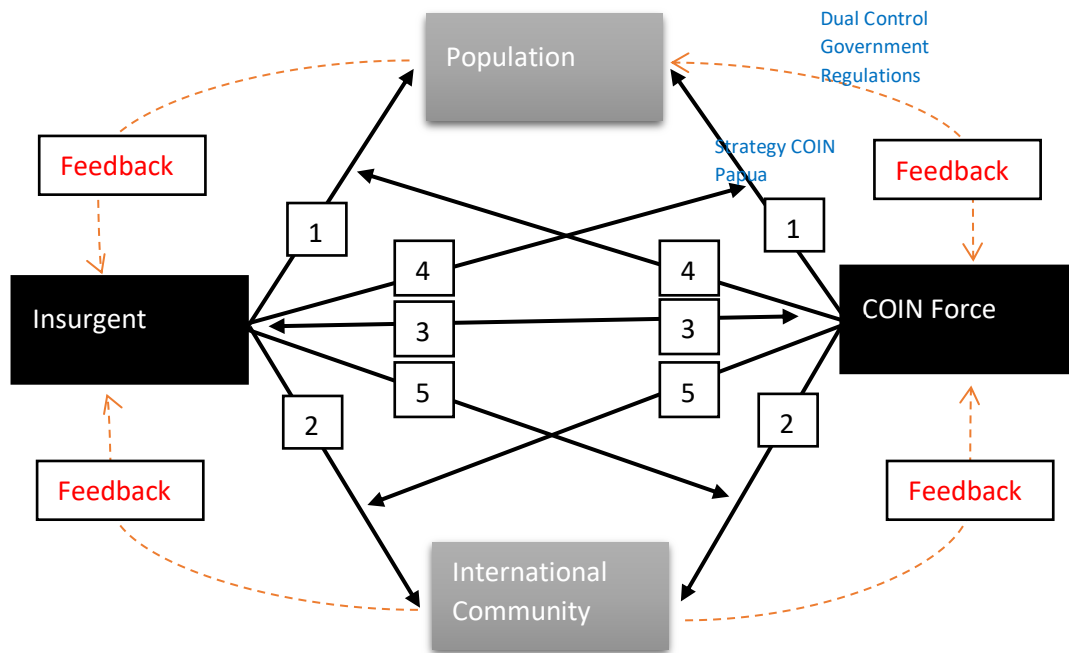
Intelijen yang diramalkan merupakan perkembangan masa depan yang berperan penting bagi intelijen, karena menunjukkan gambaran spekulatif tentang perkembangan yang akan terjadi. Pelatihan ini bertujuan untuk mengubah mindset, budaya kerja, dan perilaku aparat Intelijen Kejaksaan agar fokus pada fungsi intelijen dalam penegakan hukum preventif. Peran intelijen dapat dilaksanakan dengan mencari, mengolah, dan menyajikan informasi intelijen cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Kecepatan dan akurasi ini relevan dengan konsep deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini. Personel intelijen kejaksaan dianggap sebagai mata telinga negara (McCarthy, 2014). Secara keseluruhan, peran intelijen dalam menghadapi ancaman insurgensi di Papua sangat penting dan strategis. Dengan memiliki kecerdasan tinggi, kemampuan analisis yang tajam, serta berpikir yang tepat, intelijen dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam melindungi keamanan nasional dan

menangani ancaman-insurgensi yang kompleks dan menantang di Papua. Dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada informasi yang terkini, intelijen dapat memberikan dukungan yang efektif bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengatasi ancaman insurgensi di Papua.

Perspektif Model Mystic Diamond Dalam Penanganan Konflik Papua

Definisi McCormick menggambarkan konflik Papua sebagai pertempuran antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatisme Papua, dimana keduanya berusaha mengaitkan masyarakat Papua dan aktor internasional untuk mencapai kemenangan. Dari perspektif ini, Djon mengusulkan beberapa solusi umum untuk mengatasi konflik ini, yaitu memperkuat legitimasi pemerintah dan kontrol keamanan, fokus pada kebutuhan dasar masyarakat Papua, menghancurkan infrastruktur kelompok separatisme, dan mendapatkan dukungan internasional untuk mengakhiri kelompok separatisme (Ramdhan, 2021). Namun, dari sudut pandang studi konflik internal yang diusulkan oleh Brown, inti konflik Papua bukanlah perang separatisme tetapi masalah kegagalan negara, baik itu dalam kepemimpinan yang buruk maupun masalah domestik yang tidak terselesaikan. Menurut perspektif ini, konflik Papua bukanlah tentang perang antara pemerintah dan kelompok separatisme, tetapi lebih tentang ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap berbagai aspek yang mendorong mereka untuk memberontak (Ramdhan, 2021). Perbedaan definisi ini menunjukkan bahwa model McCormick cenderung melihat konflik secara militeristik, sementara perspektif studi konflik internal lebih menekankan pada solusi yang memperbaiki akar permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang memicu ketidakpuasan masyarakat Papua. Meskipun metode dan pendekatan berbeda, keduanya setuju bahwa kemakmuran masyarakat Papua menjadi kunci untuk mengakhiri konflik, baik itu dengan menghilangkan kelompok separatisme atau mencegah terjadinya konflik (Ramdhan, 2021). Hal yang menjadi perhatian hingga saat ini adalah bahwa kekerasan dalam konflik di Papua seringkali disorot sebagai ancaman nasional, bukan sebagai masalah domestik yang mendesak. Akibatnya, pendekatan militeristik lebih diutamakan daripada pendekatan yang berbasis kemanusiaan. Contohnya, LIPI dalam Papua Road Map menggarisbawahi bahwa kegagalan dalam pengembangan ekonomi menjadi akar dari konflik di sana. Salah satu isu kompleks adalah diskriminasi dan marginalisasi di Papua yang menghasilkan ketimpangan kemampuan antara pendatang dan penduduk asli. Meskipun secara data ekonomi menunjukkan peningkatan di Papua: Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 27,74 persen pada Maret 2018, yang menunjukkan penurunan sebesar 27,11 persen. Selain itu, terjadi peningkatan yang signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua, di mana IPM provinsi Papua meningkat dari 54,45 persen pada tahun 2010 menjadi 59,09 persen pada tahun 2018, sementara IPM provinsi Papua Barat naik dari 60,91 persen pada tahun 2013 menjadi 62,29 persen pada tahun 2017. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan standar nasional, kedua provinsi masih berada di bawah rata-rata nasional dalam hal IPM dan tingkat kemiskinan (BPS Papua, 2018).

Indikator lain yang disorot oleh BPS, seperti rasio Gini di pedesaan, menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi yang signifikan di Papua. Rasio Gini Indonesia sendiri berada di angka 0,324 pada September 2018, sedangkan provinsi Papua berada di angka 0,384 dan provinsi Papua Barat berada di angka 0,424. Perbedaan ini menyebabkan pertanyaan mengapa ketimpangan ini terjadi. Keahlian dan kapabilitas menjadi faktor utama dalam menentukan kesempatan kerja. Migran yang datang ke Papua seringkali memiliki keunggulan dalam hal keahlian dibanding penduduk asli Papua, sehingga terjadi ketimpangan secara periodik dalam sektor ekonomi (BPS, 2018).



Gambar 2. Mystic Diamond Model Insurgency Papua
Sumber : Data Diolah Penulis, 2024

Mystic diamond dalam hal ini melibatkan peran dari populasi dan komunitas internasional yang menunjukkan dukungan yang bias terhadap pemberontak dan Pasukan COIN. Pola yang terbentuk terdiri dari 5 komponen, yaitu pertama, COIN Papua membentuk pola hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan humanis dari perspektif multidimensional. Kedua, meningkatkan dan menunjukkan keseriusan dalam penyelesaian konflik melalui dialog dan internasionalisasi Papua. Ketiga, COIN Papua memiliki kontak langsung dengan pemberontak. Keempat, COIN Papua menghalangi infiltrasi yang dilakukan oleh pemberontak terhadap warga sipil sehingga logistik, senjata pasukan dan perekrutan kader baru terputus. Kelima, mengawasi dan mengamati diplomasi pemberontak dengan komunitas internasional. Strategi COIN Papua dikembangkan dengan konsep *mystic diamond* dengan tambahan pemantauan dan pengawasan kebijakan pemerintah. Implementasi kebijakan pemerintah, khususnya otonomi khusus, harus lebih transparan, tepat sasaran dan sesuai dengan alokasi dana. Penyalahgunaan dana otonomi khusus sebesar 28 triliun rupiah telah mencemari percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Kurangnya penggunaan maksimal MRP dalam otonomi khusus telah gagal membangun *Confidence Building Measures* (CBMs) kepada masyarakat dan komunitas internasional. Dalam CBM terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan; negosiasi, pengambil keputusan, dan konstituen yang lebih luas (Mason & Siegfried, 2013). Tiga isu ini merupakan bagian dari tugas diplomasi pertahanan, khususnya negosiasi dalam sektor pertahanan.

Peran Intelijen dan Perspektif Model Mystic Diamond Dalam Penanganan Konflik Papua

Inteligensi dan model *counterinsurgency* memainkan peran penting dalam menghadapi ancaman insurgensi di Papua melalui program *Mystic Diamond*. *Mystic Diamond* adalah program yang dirancang untuk melawan gerakan separatis dan kelompok bersenjata di wilayah Papua yang seringkali mengancam keamanan dan stabilitas di sana. Dengan memanfaatkan intelijen yang akurat dan model *counterinsurgency* yang efektif, program ini

bertujuan untuk menghadapi ancaman tersebut secara efektif dan menjamin keamanan bagi warga setempat. Peran intelijen dalam program *Mystic Diamond* sangatlah penting. Intelijen dapat memberikan informasi yang akurat mengenai gerakan-gerakan separatis dan kelompok bersenjata, termasuk identitas, lokasi, dan rencana operasi mereka. Dengan informasi yang diperoleh dari intelijen, pihak keamanan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dan merencanakan operasi militer yang efektif untuk mengatasi ancaman tersebut (Crile, 2015). Selain itu, model *counterinsurgency* juga menjadi bagian penting dari strategi dalam menghadapi ancaman insurgensi di Papua melalui program *Mystic Diamond*. Model *counterinsurgency* yang baik akan membantu mengidentifikasi akar masalah dari konflik tersebut, mengembangkan program rekrutmen dan pendidikan yang bertujuan untuk mengatasi penyebab radikalisme dan ekstremisme, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan dukungan dalam upaya pemberantasan gerakan separatis (Wale, 2019). Dengan memadukan peran intelijen yang efektif dan model *counterinsurgency* yang tepat, program *Mystic Diamond* diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif dalam menghadapi ancaman insurgensi di Papua. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat lokal, program ini diharapkan dapat menciptakan keamanan dan stabilitas yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Saat ini, konflik yang masih terjadi adalah jaringan Islam radikal dan separatis di Papua yang menunjukkan eskalasi yang cenderung memanas (Karnavian, 2017). Seperti bola salju yang terus bergulir, kelompok pemberontak bermaksud memecah integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimensi internasional dalam konflik Papua muncul dari ketidakselesaian masalah domestik seperti perasaan ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, dan impunitas, yang mendukung gerakan pemberontak Papua seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Keputusan MSG untuk mengakui ULMWP sebagai observer memperkuat ancaman diplomasi bagi Indonesia, dengan beberapa negara mendukung kemerdekaan Papua. Solusi militer seperti strategi kontra-insurgensi telah digunakan untuk mengatasi konflik, meskipun kekerasan terus terjadi, seperti penembakan karyawan Istaka Karya di Nduga pada 2018. Siklus kekerasan tidak hanya terjadi dalam konflik bersenjata, tetapi juga dalam kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya yang memicu kerusuhan di beberapa daerah Papua. Upaya untuk menyelesaikan konflik perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mencegah eskalasi yang lebih parah. Dengan kelemahan diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan konflik Papua, ULMWP berhasil memanfaatkan kesempatan untuk mengakses komunitas internasional dan mendapat dukungan dari negara-negara seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Dukungan ini didasari oleh laporan pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap rakyat Papua, serta identitas etnis Melanesia yang dianggap sebagai korban penindasan oleh Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia menyangkal tuduhan tersebut, simpati dari masyarakat internasional mendorong negara-negara kepulauan Pasifik untuk membantu perjuangan ULMWP dalam menyuarkan hak kemerdekaan Papua.

Dengan memiliki kecerdasan tinggi, kemampuan analisis yang tajam, serta berpikir yang tepat, peran intelijen dalam menghadapi ancaman insurgensi di Papua sangat penting dan strategis. Dengan pendekatan komprehensif dan berbasis pada informasi terkini, intelijen dapat memberikan kontribusi signifikan dalam melindungi keamanan nasional dan menangani ancaman-insurgensi yang kompleks dan menantang di Papua. Dukungan intelijen yang efektif dalam menyediakan informasi yang akurat dan relevan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menghadapi ancaman insurgensi di Papua. Konflik

di Papua merupakan akibat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai aspek yang mendorong mereka untuk memberontak, bukan hanya perang antara pemerintah dan kelompok separatisme. Meskipun terjadi peningkatan dalam indikator ekonomi di Papua, seperti penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, namun masih terdapat ketimpangan ekonomi yang signifikan di sana. Strategi COIN Papua dengan konsep mystic diamond dan implementasi kebijakan pemerintah yang lebih transparan dan tepat sasaran menjadi kunci untuk mengatasi konflik ini dan membangun Confidence Building Measures kepada masyarakat dan komunitas internasional. Dengan memanfaatkan intelijen yang akurat dan model counterinsurgency yang efektif, program Mystic Diamond bertujuan untuk menghadapi ancaman insurgensi di Papua secara efektif. Melalui peran penting intelijen dalam memberikan informasi yang akurat tentang gerakan separatis dan kelompok bersenjata, serta model counterinsurgency yang membantu mengidentifikasi akar masalah konflik dan mengembangkan program pencegahan, program ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif dalam memastikan keamanan dan stabilitas yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat lokal, bisa diharapkan bahwa Mystic Diamond akan berhasil mengatasi ancaman insurgensi di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashour, O. M. (2009). Counter-insurgency in Egypt: The paradox of indirect approaches. *Middle East Policy*, 16(1), 106-119.
- Chauvel, R. (2005). Understanding the Papua conflict: A comprehensive analysis. *Journal of Southeast Asian Studies*, 36(2), 345-359.
- Crile, G. (2015). *Charlie Wilson's War: The Story of the Largest Covert Operation in History: The Arming of the Mujahideen by the CIA*. Atlantic Books Ltd.
- Devine, M. E. (2020). Covert action and clandestine activities of the intelligence community: Framework for congressional oversight: In brief (updated). In *Key Congressional Reports for August 2019*. Part V. Congressional Quarterly Press.
- Fretes, C. H. J. De, & Carnelian, C. (2017). Politik Identitas Dalam Krisis Ukraina 2013. *Cakrawala Jurnal Penelitian* ..., 6(1), 59-74. <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/1287%0Ahttps://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/download/1287/627>
- G. Chaliand dan A. Blind. (2007). *History of Terrorism: From Antiquity to al-Qaeda*. California: University of California Press.
- Galula, D. (2006). *Counterinsurgency warfare: Theory and practice*. New York, NY: Praeger.
- Garthoff, R. L. (2002). The Hidden Hand: Britain, America and Cold War Secret Intelligence by Richard J. Aldrich . In *Political Science Quarterly* (Vol. 117, Issue 2). John Murray London. <https://doi.org/10.2307/798193>
- Gasiorowski, M. J., & Byrne, M. (2015). Mohammad Mosaddeq and the 1953 coup in Iran. In *Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran*. Syracuse University Press. <https://doi.org/10.2307/20034183>
- Globalfirepower. (2022). Comparison of Ukraine and Russia Military Strengths (2022). <https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?country1=ukraine&country2=russia>
- Groom, A. J. R. (1994). Conflict resolution, theory and practice: integration and application. In *International Affairs* (Vol. 70, Issue 1). Manchester University Press. <https://doi.org/10.2307/2620730>

- Hanifah, U. R. N. M. (2017). Embargo Ekonomi sebagai Strategi Konfrontasi Uni Eropa terhadap Rusia pada Masa Konflik Ukraina 2013-2015. *Jurnal Sosial Politik*, 3(2), 169. <https://doi.org/10.22219/sospol.v3i2.5063>
- Harding, L. (2014). Crimea votes to secede from Ukraine in “illegal” poll. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2014/mar/16/ukraine-russia-truce-crimea-referendum>
- Hirsh, M. (2022). Why russia’s economy is holding on. *Foreign Policy*. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2022/04/22%0A/russia-war-economy-sanctions-ruble/>
- Indriani, K. (2014). Aneksasi Rusia Di Krimea Dan Konsekuensi Bagi Ukraina. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(15). <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v11i2.199>
- Ingle, S. (2022). Roman Abramovich hit by sanctions: What does it mean for Chelsea? *The Guardian*. *Guardian*. <https://www.theguardian.com/football%0A/2022/mar/10/roman-abramovich-sa%0Ancioned-what-does-it-mean-for-chelsea>
- Irving, J. A., & Kent, S. (1951). Strategic Intelligence for American World Policy. *International Journal*, 6(4), 336. <https://doi.org/10.2307/40197722>
- j. Moleong, L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. In Bandung.
- Joint Chief of Staff of the United States Air Force. (2018). Counter-insurgency operations: A comprehensive guide. Washington, DC: Government Printing Office.
- Karwita, H. S. (2008). Intelijen Teori, Aplikasi, Dan Modernisasi Disusun Wendratama. Ekalaya Saputra.
- Karnavian, TM (2017). Police in Handling Insurgency in Indonesia. *Journal of Police Science*. Edition , (August-October)
- Kirby, P. (2022). Mengapa Rusia menyerbu Ukraina dan apa yang diinginkan Putin dengan meluncurkan “operasi militer khusus”? *BBC*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60507911>
- Leary, W. M. (2007). CIA Air Operations in Laos, 1955-1974", Center for the Study of Intelligence. *CSI Publications*, 43(3).
- Lowenthal, M. M. (2000). Intelligence: from secrets to policy. In *Choice Reviews Online* (Vol. 38, Issue 01). CQPress. <https://doi.org/10.5860/choice.38-0594>
- Lykke, A. F. (1988). *Military strategy: theory and application*. US Army war college.
- Manullang, A. C. (2001). Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif, dan Rezim. Pantha Rhei.
- McCarthy, D. S. (2014). Shadow Warrior: William Egan Colby and the CIA. In *Journal of American History* (Vol. 101, Issue 1). Basic Books. <https://doi.org/10.1093/jahist/jau270>
- McCormick, G. (1999). The mystic diamond: A new strategy for counter-insurgency. *Journal of Military Strategy*, 25(3), 78-91.
- Meel, P., & Vishwakarma, A. (2020). The role of technology in modern insurgency movements: A comparative study. *Journal of Conflict Studies*, 40(2), 56-72.
- Naim, N. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia,” in Kamus Besar Bahasa Indonesia. In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. <https://www.kbbi.web.id/>
- Nasution, A., & Wiranto, J. (2020). Insurgent propaganda and international attention: A case study of conflict in Indonesia. *International Journal of Political Communication*, 10(3), 234-248.
- Mambraku, Nomensen ST. 2015. Conflict Resolution in the Land of Papua from a Political Perspective. *Study Vol. 20 No. 2 June 2015*. Page. 78

- Mambraku, Nomensen ST. 2015. Root Problems and Alternative Conflict Resolution Processes: Aceh, Jakarta, Papua. Page. 91-106.
- Ramdhan, A. (2021). Human rights violations as a tool for insurgency: A critical analysis. *Journal of Conflict Resolution*, 15(4), 345-359.
- Wale, M. K. (2019). Intelligence-based conflict prevention in Papua New Guinea. *Journal of Intelligence History*, 6(2), 88-102.
- Wanggai, P. (2017). Building trust and stability in Papua: A government perspective. *Journal of Pacific Affairs*, 30(4), 156-170.